

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasca jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, mekanisme pemilu di Indonesia sedikit banyak telah mengalami perubahan. Pertama, direalisasikan kembali sistem ‘multipartai’ pada pemilu 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Kedua, diadakannya pemilu secara langsung baik presiden maupun legislatif pada tahun 2004. Perubahan yang ketiga, dengan dikeluarkannya PP No. 6 tahun 2005 (tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan PEMILUKADA (pemilihan kepala daerah) secara langsung seperti yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004.<sup>1</sup>

Implementasi dari UU No. 32 tahun 2004 telah merubah wajah perpolitikan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung, yang menjadi bentuk implementasi dari Undang-Undang tersebut. Demam Pemilukada pun kini telah menyebar hampir merata di berbagai daerah. Tentu ini salah satu instrument penting dalam menyelenggarakan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Tidak lain tidak bukan tujuan utamanya ialah pengambilan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di dalam negara, baik Presiden maupun kepala daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Pemilukada yang sebelumnya lebih

---

<sup>1</sup> Firmanzah Ph.D, *MARKETING POLITIK Antara Pemahaman Dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. XXX.

sering dikenal dengan sebutan Pilkada, kini menjadi sangat bermakna penting dalam proses konsolidasi demokrasi di ranah lokal.

Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia sendiri baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005, hal itu menjadi perwujudan kembali hak-hak dasar masyarakat dalam berpolitik di daerah. Tujuannya adalah pemenuhan kewenangan untuk masyarakat daerah dalam proses rekrutmen, seleksi dan pemilihan pemimpin daerahnya. Secara tidak langsung, proses itu mampu mendewasakan kehidupan berdemokrasi dan berpolitik di ranah lokal. Hingga akhirnya diharapkan hasil dari proses itu semua adalah munculnya pemimpin daerah yang demokratis dan dapat bersentuhan langsung dengan aspirasi masyarakat yang telah memilihnya, selain itu juga dapat mengemban amanat dengan baik, seperti apa yang telah dijanjikan di saat kampanye politiknya sebelum ia terpilih.

Pertama kali dilaksanakannya Pemilukada di Indonesia saat itu, mekanisme yang berjalan dalam proses Pemilukada langsung telah menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik satu-satunya dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Membuka diri terhadap dinamika masyarakat, pemberdayaan masyarakat sipil oleh partai politik menjadi dampak yang diharapkan dari sebuah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 56, setiap kontestan Pemilukada diwajibkan memakai kendaraan berupa partai politik dan gabungan parpol. Kendaraan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk masuk arena, melainkan juga sebagai mesin yang bekerja untuk mengumpulkan dukungan rakyat. Calon yang belum dikenal publik, mereka harus bekerja keras mendekati publik,

memperkenalkan diri, visi misi, program aksi ke publik. Usaha keras ini tentu membutuhkan dukungan kekuatan mesin politik dalam mengambil rakyat, untuk meraih kekuasaan.

Hal itu juga terlihat ketika partai politik dihadapkan pada sistem kepartaian di Indonesia yang menggunakan sistem multipartai, yang akhirnya seluruh kontestan dituntut untuk mampu merebut kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam persaingan yang sangat ketat. Tujuan akhir dari persaingan antar partai itu ialah partai mana yang mampu dan yang lebih efektif untuk bisa “membawa” pemilih ke tempat pemungutan suara(TPS) dan mencoblos kandidat yang di usungnya.<sup>2</sup>

Jika PemiluKada diibaratkan sebuah medan pertarungan, dan para kandidat yang bersaing adalah musuh dalam pertarungan tersebut, maka suara pemilih yang menjadi alasan pertarungan itu terjadi. Oleh karena itu, untuk meraih suara-suara pemilih dengan semaksimal mungkin, butuh strategi dan taktik yang baik dan efektif.

Strategi setiap partai dibutuhkan agar mampu bersaing dan meraih kemenangan dalam sebuah PemiluKada. Dalam hal ini harus banyak orang yang berada di partai tersebut, yang mampu menyumbangkan pandangan dan pemikiran positif terhadap partainya. Sehingga, strategi partai baik kampanye, koalisi, rekrutmen, pencitraan dan konsolidasi berjalan efektif. Startegi-startegi tersebut menjadi kunci utama dalam “memenangkan” suara rakyat di dalam sebuah pemilihan.<sup>3</sup>

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni tahun 2011 menjadi tolak ukur kedewasaan politik dan demokrasi di

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Peter Schorder, *Strategi Politik*, Frederich Ndauman Stifung, Jakarta, 1998, hal. 4.

daerah ini. Terdapat 4 pasangan calon yang bersaing dalam pentas Pemilukada tersebut, berikut nama-nama pasangan dan partai pengusungnya:

**Tabel 1.1**  
**Nama Pasangan Kandidat dan Partai Pengusung**

<b>Nama Kandidat Pasangan</b>	<b>Nama Partai Pengusung</b>
Drs.Sarwidi-Hartikah,S.Ag (Sartika)	PKB
Drs.H.Mulyono-Ahmad Sumiyanto,SE,M.Si (NOTO)	Partai Demokrat dan PKS
Drs.Suprpto-Drs.HM.So'im,MM (Prakoso)	Partai Golkar, Gerindra, PDK, PKPB, dan PKNU
dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG- Drs.H.Sutedjo (Sehat)	PAN, PPP dan PDI-Perjuangan

*Sumber: KPU Kabupaten Kulon Progo*

Pasangan dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG-Drs.H.Sutedjo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang dikenal memiliki basis dukungan dan loyalis yang kuat di Provinsi Yogyakarta. Hal itu terlihat dari perolehan suara dalam Pemilu legislatif, dimana perolehan suaranya di setiap kabupaten yang ada di Yogyakarta tidak pernah keluar dari dua besar perolehan suara terbanyak. Selain itu, dari Pemilukada yang telah berjalan di beberapa kabupaten di Yogyakarta, dari 3 pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu untuk Kabupaten Sleman dan Bantul, PDI-Perjuangan mampu memenangkannya, hanya saja untuk Kabupaten Gunung Kidul perolehan suara kandidat yang diusung PDI-Perjuangan tidak mampu menyaingi kandidat yang diusung partai lain yaitu pasangan Prof Dr Sumpeno-Badingah yang akhirnya keluar sebagai pemenang.

Dari hasil Pemilukada di Kulon Progo sendiri yang telah dilaksanakan pada bulan Juni lalu, PDI-Perjuangan mampu memenangkan pasangan yang diusungnya yaitu dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG-Drs.H.Sutedjo dengan perolehan suara yang jauh

mengungguli kandidat-kandidat lainnya. Penguasaan kantong-kantong suara yang memang menjadi basis suara PDI-Perjuangan dan basis suara PAN sebagai partai koalisinya dalam mengukung pasangan dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG-Drs.H.Sutedjo berhasil dimaksimalkan. Memang sudah tidak diragukan lagi, sebelum pelaksanaan pemilihan pasangan ini sudah diunggulkan akan menang. Alasannya ialah partai yang menjadi pengusung pasangan tersebut adalah dua partai penguasa pada Pemilu legislatif, Partai Amanat Nasional adalah partai yang memiliki perolehan suara terbanyak dan disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Berikut hasil dari perolehan suara masing-masing kandidat:

**Tabel 1.2**

**Perolehan suara Pemilukada Kulon Progo**

Kecamatan	1 Drs.Sarwidi dan Hartikah,S.Ag	2 Drs.H.Mulyono dan Ahmad Sumiyanto,SE, M.Si	3 Drs.Suprpto dan Drs.HM.So'im ,MM	4 dr.Hasto Wardoyo,Sp.O G dan Drs.H.Sutedjo
Temon	985	2718	4503	6311
Wates	1464	6798	4352	11941
Panjatan	1141	7231	3896	6373
Galur	703	6892	4812	5210
Lendah	1067	9632	2853	8073
Sentolo	1693	6912	5136	11877
Pengasih	1620	8864	3015	12654
Kokap	901	2542	5774	10599
Nanggulan	813	3692	2309	9226
Girimulyo	800	3759	1621	7323
Samigaluh	1151	4165	2425	7629
Kalibawang	967	3974	1907	8517
Total Suara	13.305	67.179	42.603	105.733
Persentase suara	5,81%	29,36%	18,62%	46,21%

*Sumber: KPU Kabupaten Kulon Progo*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang melaksanakan pemilihan, 9 kecamatan di antaranya dimenangkan oleh pasangan dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG-Drs.H.Sutedjo.

Keberhasilan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kulon Progo dalam memenangkan kandidat yang diusungnya, ternyata diikuti juga oleh kemenangan PDI-Perjuangan dalam Pemilu Kota Yogyakarta baru-baru ini.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana sebenarnya sepak terjang taktik dan strategi PDI-Perjuangan memenangkan Pemilu, khususnya pada pasangan dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG-Drs.H.Sutedjo dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo 2011.

Untuk melihat dan meneliti lebih mendalam mengenai kesuksesan PDI-Perjuangan memenangkan pasangan dr.Hasto Wardoyo,Sp.OG-Drs.H.Sutedjo, maka penulis mencoba mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul: “Strategi Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” (Studi Kasus Pemilu Kabupaten Kulon Progo 2011)

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang diangkat sebagai isu pokok permasalahan cenderung dalam ruang lingkup yang luas dan mendalam. Dari latar belakang di atas maka penulis mencoba membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut yaitu :

“Bagaimana strategi PDI-Perjuangan Kabupaten Kulon Progo memenangkan pasangan dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG dan Drs.H.Sutedjo dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo 2011 ?”

### **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa strategi PDI-Perjuangan memenangkan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2011.
- b. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim kampanye dalam memenangkan pasangan dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG dan Drs.H.Sutedjo dalam Pemilukada Kulon Progo 2011.

#### 2. Manfaat penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan Ilmu Pemerintahan khususnya di UMY.

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi bagi partai dan orang lain yang berhubungan dengan strategi pemenangan PDI-Perjuangan dalam Pemilukada 2011.

### **D. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan dasar dalam sebuah penelitian yang menjadi acuan atau pedoman untuk mengungkapkan segenap macam permasalahan dengan menggunakan berbagai teori yang ada, dimana teori tersebut dianggap memiliki kaitan langsung dengan permasalahan, yang nantinya akan menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu disusun kerangka teori yang dapat memuat berbagai pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah dalam penelitian skripsi ini akan disoroti.

Definisi teori yang dikemukakan oleh Marx dan Goodson yang menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian (yang diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.<sup>4</sup>

Dari segi fungsi teori menurut Snelbecker menyatakan ada empat fungsi teori, yaitu (1) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, (2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, (3) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (4) menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan “mengapa”.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan berbagai teori yang dianggap memiliki kaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitiannya, yang bertujuan untuk pemecahan permasalahan dalam penelitiannya. Adapun teori-teori menurut penulis yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Demokrasi**

Pelaksanaan demokrasi dapat diselenggarakan dengan dua cara yaitu demokrasi langsung dan perwakilan. Ketidakpercayaan pada elit politik membuat proses rekrutmen pemimpin di Indonesia mengarah pada demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah. Dari

---

<sup>4</sup> Dr.Lexy J.Moeleong,MA, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 35.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 36.



pelaksanaannya kita dapat melihat ke depan bagaimana pesta demokrasi lokal di Indonesia berjalan, akankah terjadi perkembangan reformasi politik lokal atau hanya *an old one in a new bottle*. Demokrasi sendiri merupakan aspek penting dalam kaitannya dengan pemerintahan dan kekuasaan yang terdapat dalam sebuah sistem politik yang berjalan di suatu negara.

Demokrasi sendiri lahir dari bangsa Yunani kuno yang mengedepankan gaya pemerintahan berdasarkan suara rakyat. Secara umum makna dari demokrasi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa arti dari demokrasi itu adalah rakyat memerintah atau pemerintahan yang seringkali dikatakan sebagai *by the people, for the people, and to the people*. Namun demikian, demokrasi cenderung mengarah pada sistem pemerintahan yang agresif dan tidak stabil.

Di bawah ini disampaikan beberapa definisi mengenai demokrasi menurut beberapa para ahli:

David Schumpeter: Demokrasi adalah sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Robert A. Dahl: Demokrasi adalah tentang kepemilikan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi memberikan kesempatan-kesempatan antara lain, (1) partisipasi yang efektif, (2) persamaan dalam pemberian suara, (3) mendapatkan pemahaman yang

lebih jernih, (4) melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda dan, (5) pencakupan hak orang dewasa, yakni setiap warga negara dewasa memiliki hak kewarganegaraan penuh, yakni hak politik.<sup>6</sup>

Menurut S.M. Lipset terdapat tiga syarat pokok substansial demokrasi.<sup>7</sup>

**Pertama**, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi tertentu dalam memperebutkan sebuah kekuasaan tanpa menggunakan paksaan. **Kedua**, melibatkan sebanyak mungkin warga negara tanpa pengecualian kelompok tertentu untuk berpartisipasi dalam politik melalui proses pemilihan pemimpin. **Ketiga**, adanya kebebasan sipil dalam politik yaitu kebebasan pers, kebebasan berbicara dan kebebasan membentuk atau bergabung kedalam suatu organisasi politik

David Held dalam bukunya *Models of Democracy* membagi model-model demokrasi menjadi sekitar 13 model varian demokrasi. Namun pada dasarnya, held menyatakan demokrasi dapat di bagi kedalam dua tipe umum demokrasi, yakni demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan atau demokrasi liberal. Berikut penulis menyertakan tabel model-model demokrasi menurut Held yang pernah dikenal di dunia. Model-model demokrasi tersebut disuguhkan model I, model II a, model II b, model III a, model III b, model IV dan seterusnya.

---

<sup>6</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. 52-55.

<sup>7</sup> Muchtar Masoed, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 4.

**Tabel 1.3**  
**Model-Model Demokrasi Menurut Held**

<b>Model Demokrasi</b>	<b>Prinsip-Prinsip Penilaian</b>
Model I Demokrasi Klasik	Warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
Model II a Republikanisme Protektif	Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai diri mereka sendiri, mereka akan didominasi yang lain.
Model II Republikanisme dan Perkembangan	Para warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
Model III a Demokrasi Protektif	Para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya, untuk memastikan mereka yang memimpin melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan penduduk secara keseluruhan.
III b Demokrasi Developmental	Partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu “ yang tertinggi dan harmonis”.
Model IV Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik	“pembangunan yang bebas dari semuanya” hanya dapat diraih dengan “ pembangunan yang bebas dari setiap orang”. Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-benar lengkap; hanya kesetaraan yang dapat menjamin keadaan-keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga “setiap orang dapat memberi” sesuai dengan kemampuannya dan “ menerima apa yang mereka butuhkan”.
Model V Demokrasi Kompetisi Elit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pemilihan elit politik yang terampil dan imajinatif yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif.</li> <li>2. Hambatan bagi kepemimpinan politik yang berlebihan.</li> </ol>

Model VI Pluralisme	Menjamin pemerintahan oleh minoritas dan, dengan demikian, kebebasan politik penghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan yang berlebihan dan negara yang tidak responsif.
Model VII Demokrasi Legal	Prinsip mayoritas merupakan sebuah cara yang efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenang-wenangan pihak pemerintah dan mempertahankan kebebasan. Namun, bagi kehidupan politik, seperti kehidupan ekonomi, untuk menjadi kira-kira inisiatif dan kebebasan individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi oleh peraturan hukum. Hanya di bawah kondisi-kondisi tersebut, prinsip mayoritas dapat berfungsi dengan pantas dan bijak.
Model VIII Demokrasi Partisipatif	Sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat diperoleh dalam sebuah masyarakat yang partisipatif, sebuah masyarakat yang membantu perkembangan sebuah kemampuan nilai politik, memelihara sebuah urusan terhadap masalah-masalah kolektif dan menyumbangkan pada formasi warga negara yang berpengetahuan yang mampu menerima sebuah kepentingan tetap dalam proses memerintah.
Model IX Demokrasi Deliberatif	Persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas dan berdasarkan pada nalar. Kemampuan “justifikasi mutual” keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi permasalahan kolektif.
Model Xa Otonomi Demokrasi	Orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang setara dan, selanjutnya kewajiban yang setara dalam spesifikasi kerangka kerja politik menciptakan dan membatasi kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh masyarakat; yaitu artinya, mereka harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri, selama mereka tidak menyebarluaskan kerangka kerja ini untuk mengingkari atau menyangkal atau melanggar hak-hak orang lain.
Model Xb Demokrasi Kosmopolitan	Dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan “komunikasi nasib” yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global maupun pemerintahan lokal dan nasional.

*Sumber: David Held, Models of democracy, 2007.*

Held kemudian menyatakan bahwa posisi rakyat dan pemerintah bisa berbeda-beda tergantung bagaimana demokrasi diartikan. Namun demikian,, demokrasi tetap dianggap sebagai suatu paham yang paling tepat karena memiliki nilai-nilai berikut ini: kesetaraan politik, kebebasan, pembangunan moral, kepentingan bersama, kompromi moral yang adil, keputusan yang mengikat yang mempertimbangkan kepentingan bersama, keperluan sosial, pemenuhan kebutuhan dan keputusan yang efisien.<sup>8</sup>

Dengan demikian, nilai dasar demokrasi itu sendiri ialah kebebasan yang didapat oleh setiap manusia yang dalam arti positif, dimana kebebasan dalam demokrasi itu dapat menopang dan melindungi hak-hak manusia dalam hal ini kesetaraan dan pemenuhan hak-hak masing-masing individu manusia tersebut.

## **2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**

### **a. Pemilihan Umum**

Secara umum pengertian dari Pemilihan Umum yang sering disebut dengan istilah Pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat ataupun pejabat-pejabat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat atau DPR.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

---

<sup>8</sup> David Held, *Models of Democracy*, Edisi terjemahan, oleh Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007.

Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 (1), yang berbunyi:

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu ciri yang melekat pada negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demikian berarti pemilu merupakan sarana yang penting untuk melibatkan rakyat dalam kehidupan berdemokrasi di negaranya yaitu dengan memilih wakil-wakilnya dalam kurun periode tertentu untuk menjalankan dan mengendalikan roda pemerintahan.<sup>10</sup> Dalam Pemilu, para pemilihnya di sebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang pemungutan suara.

Seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat(2) yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,<sup>11</sup> ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu segala wewenang yang ada di dalam negara, yang menentukan segala corak, cara pemerintahan serta tujuan negara adalah dan dilakukan oleh rakyat.

Sistem pemilihan yang berjalan di suatu negara menjadi faktor penting dalam menentukan tipe sistem kepartaian negara tersebut. Kaitan yang erat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 (1)

<sup>10</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 81.

<sup>11</sup> “UUD 1945 Dan Amandemennya”, Bab 1 Pasal 1 Ayat (2), Surakarta: Pustaka Mandiri Surakarta.

antara parpol dan pemilu dapat ditunjukkan oleh Maurice Duverger<sup>12</sup>, yang mengatakan bahwa partai politik dan pemilu merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi secara garis besar berkisar pada dua prinsip pokok yaitu :

(1) Sistem pemilihan organis

Sistem pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup (organisasi massa) berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga, bani, dsb), kepentingan ekonomi (buruh, petani, pengusaha), kelas-kelas sosial (cendekiawan, profesional) dan agama. Masyarakat adalah suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalite organisme itu, seperti persekutuan-persekutuan hidup tersebut diatas. Persekutuan-persekutuan tersebutlah yang mengatur dan mengendalikan kepentingan-kepentingan individu dalam persekutuan tersebut. Dalam merumuskan kepentingan, persekutuan membentuk dewan atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang matang secara ideologis, berpengalaman, dapat dipercaya, tidak tercela, tidak pernah mengkhianati rakyat yang tergabung dalam persekutuan. Oleh karena itu partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan dapat diselenggarakan oleh tiap-tiap persekutuan hidup (organisasi massa) dalam lingkungannya sendiri. Badan perwakilannya bersifat Badan perwakilan kepentingan-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 79.

kepentingan khusus persekutuan hidup itu, berupa Dewan korporatif yang wakil-wakilnya diangkat oleh persekutuan hidup yang bersangkutan.<sup>13</sup>

(2) Sistem pemilihan mekanis.

Sistem pemilihan mekanis dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :

- Sistem Daerah Pemilihan atau Distrik

Dimana dalam satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil (*the winner take all atau zero sum game*) atau *single member constituency*.

Sistem ini merupakan system pemilihan paling tua dan didasarkan pada satu kesatuan daerah pemilihan (distrik). Setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Jumlah dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah daerah pemilihan. Calon Anggota DPRD dalam satu daerah pemilihan (distrik) yang memperoleh suara terbanyak atau menang berhak untuk duduk di dewan perwakilan rakyat mewakili rakyat di daerah pemilihannya. Seberapapun selisih kemenangannya. Sedangkan suara-suara pemilih yang ditujukan kepada calon lain akan tetapi tidak menang (kalah) dalam pemilihan umum dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi.

Sistem ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya :

Pertama, wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk di daerah pemilihan, sehingga hubungannya dengan penduduk lebih erat. Faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan aktor penting ; kedua, lebih mendorong penyatuan parpol-parpol karena kursi yang diperebutkan

---

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PD. Budi Chaniago, Jakarta, 1988, hal.333.



hanya satu. Sehingga akan terjadi penyederhanaan parpol-parpol tanpa adanya paksaan ; ketiga, berkurangnya parpol dan meningkatkan kerjasama atau koalisi antara parpol-parpol sehingga mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil ; keempat, Sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Selain kelebihan terdapat kelemahan dari sistem ini, diantaranya :

Pertama, Kurang memperhitungkan parpol-parpol kecil dan kelompok minoritas, apalagi jika kelompok minoritas tersebar di beberapa daerah pemilihan ;kedua, Kurangnya keterwakilan karena suara-suara yang tidak memilih calon yang menang akan hilang dan tidak diperhitungkan sama sekali. Jika suara yang hilang mencapai jumlah besar akan diprotes karena dianggap tidak adil oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan ;

- Sistem Perwakilan Berimbang atau Proportional Representation

Dalam satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau multi member constituency. Secara mendasar jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu kelompok atau parpol adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk itu ditentukan sesuatu perimbangan misalnya 1: 200.000. Artinya dari jumlah suara pemilih sebesar 200.000 suatu kelompok atau parpol akan menempatkan 1 (satu) wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan yang besar, dan untuk keperluan teknis administratif dibagi-bagi ke dalam beberapa daerah pemilihan yang besar. Dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan tersebut.

Dalam sistem ini setiap suara dihitung. Suara lebih parpol dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh parpol itu dalam daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain diantaranya sistem daftar (list system). Dimana setiap parpol mengajukan satu daftar calon dan pemilih memilih salah satu daftar dari parpol. Dengan demikian pemilih memilih satu partai dengan daftar calon yang diajukan untuk berbagai macam kursi yang diperebutkan. Kelebihan dari sistem ini adalah :

Pertama, bersifat representative dalam arti setiap suara diperhitungkan dan tidak ada suara yang hilang ; kedua, golongan minoritas sekecil apapun, dapat menempatkan wakilnya dalam parlemen. Struktur masyarakat yang heterogen umumnya lebih tertarik dengan sistem ini karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan.

Sehubungan dengan Pemilu A. Sudiharto Djiwandono mengemukakan pendapatnya bahwa :

Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting; ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>14</sup> Pada saat sekarang ini memang tidak dimungkinkan rakyat untuk terlibat secara langsung dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk suatu negara, sehingga tidak dimungkinkan

---

<sup>14</sup> A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilu dan Pendidikan Politik*, CSIS, Jakarta, 1983, hal. 201.

untuk melibatkan mereka seluruhnya secara langsung dalam kehidupan kenegaraan.

Sebagaimana layaknya sebuah Pemilu terselenggara, tentunya memerlukan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala macam saat pelaksanaannya nanti. Diantara persiapan itu yang paling pokok dan langsung adalah adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang di buat dan nantinya diterapkan dalam proses pemilihan umum tersebut. Hal itu ditujukan untuk sebuah kelancaran pelaksanaan sebuah pemilihan umum.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah alat untuk sebuah proses demokrasi yang memiliki tujuan dalam perwujudan hak-hak politik warga negara untuk bisa menentukan atau memilih wakil-wakilnya yang di anggap mampu mengapresiasi kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintahan yang berkuasa, melalui proses pemilihan secara langsung yang bebas, jujur dan adil.

Adapun mengenai hubungan strategis antara pemilu dengan demokrasi dalam konteks pelaksanaan pemilu di Indonesia juga menjadi topik yang dibahas secara mendalam. Seperti kita ketahui bersama bahwa perjalanan dan pengalaman pelaksanaan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia baru berlangsung 6 (enam) dasawarsa. Sesungguhnya komitmen para founding fathers terhadap penyelenggaraan Negara, yang telah menggunakan sistem demokrasi, patut menjadi tonggak sejarah bahwa sejak lahirnya Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memegang prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun pelaksanaan Pemilu di Indonesia baru terlaksana tahun 1955, yakni 10 (sepuluh) tahun kemudian setelah proklamasi tahun 1945. Pertimbangan ketidakstabilan politik, yang terjadi pada waktu itu menjadi alasan pokok belum memungkinkan diselenggarakan pemilu lebih cepat. Pada tahun 1955 tersebut Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama dengan diikuti oleh lebih dari 10 (sepuluh) partai politik. Dalam catatan sejarah, pemilu tahun 1955 sebagai pemilu yang paling demokratis karena disamping tidak ada korban jiwa juga berjalan dengan jujur, adil dan aman. Jika dibandingkan pemilu di era Orde Baru yang berjalan mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, sepanjang pelaksanaan pemilu tersebut, banyak peristiwa politik berdarah dan cukup mencekam bagi masyarakat Indonesia.

Sejarah Pemilu di Era Orde Baru yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali tersebut yang sangat fenomenal dalam pemilu Era Orde Baru tersebut, terpilih presiden yang sama yaitu; Jenderal Besar Mohammad Soeharto. Sedangkan di era reformasi pemilu diselenggarakan tahun 1999 dan tahun 2004. Pada saat penggantian Rezim Orde Baru ke Reformasi terjadi penggantian Presiden sebanyak 4 (empat) kali. Presiden B.J. Habibie sebagai presiden masa transisi tahun 1998 s/d 1999 dan Presiden Abdulrahman Wachid tahun 1999 s/d 2001 hasil pemilu tahun 1999. Oleh karena terjadinya peristiwa politik, timbulnya mosi tidak percaya dari rakyat, maka Presiden Abdulrahman Wachid diberhentikan dari jabatan presiden,

melalui Sidang Istimewa MPR. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 s/d 2004. Adapun pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama dalam sejarah politik di Indonesia yaitu memilih presiden secara langsung. Hasil pemilu tahun 2004 sebagai presiden terpilih secara demokratis adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan M. Yusuf Kalla sebagai wakilnya.

Mencermati perkembangan pemilu demi pemilu di Indonesia yang sudah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali, seharusnya membuat masyarakat dan bangsa Indonesia semakin cerdas dalam menjalankan etika dan moral politik yang menjadi dasar dalam mengimplementasi Konsep Sistem Politik yang demokratis. Namun peristiwa politik berupa insiden kekerasan dan konflik sosial masih mewarnai dalam pelaksanaan pemilu. Fenomena penting yang perlu dicermati perkembangan dalam pemilu terutama dalam pemilu gubernur dan bupati/walikota disamping sering timbul konflik horizontal juga diwarnai money politics dan high cost politics. Padahal tujuan utama pemilu memberikan proses pendidikan politik warga negara dan pendemokrasian politik, sosial dan ekonomi. Namun ternyata hasilnya, menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat terhadap pemilu masih rendah, berbagai daerah jumlah pemilih yang tidak melaksanakan hak pilihnya alias golput masih diatas 40% dan bahkan ada beberapa daerah mendekati angka 50%. Pemimpin yang terpilih juga sebagian besar tidak mencerminkan aspirasi rakyat dengan indikasinya para kepala daerah

(Gubernur, Bupati/Walikota) terpilih di samping tidak profesional dan kompeten juga banyak yang terlibat dalam kasus hukum (korupsi).

Barangkali pemilu yang terlalu sering dilaksanakan membuat masyarakat jenuh dan apatis. Apalagi hasil pemilu tidak kunjung memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat dan bahkan kehidupan masyarakat semakin hari semakin mengalami kesulitan. Pemilu masih hanya sekedar menjalankan proses politik secara prosedural, hanya digunakan untuk pelegitimasi saja, belum secara substansial. Jadi pemilu masih menjadi permainan para elite politik saja, dan belum menyentuh kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Meskipun pemilu sudah berjalan selama 6 (enam) dasawarsa lebih selama usia Republik ini, kenyataannya belum bisa memberikan jaminan terselenggaranya stabilitas politik dan ekonomi, yang menopang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga menjadi pertanyaan besar apakah sistem pemilihannya yang salah atau para elite politik yang tidak istiqomah menjalankan kewajiban sebagai seorang negarawan, yang menduduki kursi sebagai pejabat publik.

Dengan demikian bagaimana mendesain sistem pemilu yang bisa mendorong terwujudnya praktek demokrasi yang berkualitas. Demokrasi memang suatu konsep politik yang menjadi harapan semua pihak bahwa dengan terciptanya sistem demokrasi yang dipraktikkan suatu negara mampu memperbaiki keadaan ekonomi dan politik, seperti disebutkan diatas. Namun implementasi demokrasi di setiap negara hasilnya berbeda-beda. Seperti misalnya di India yang sudah ratusan tahun menerapkan

demokrasi, tapi keadaan rakyatnya masih tetap miskin. Akan tetapi di Cina negara komunis yang sangat otoriter berhasil membangun ekonominya dengan spektakuler yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 9% di tengah krisis keuangan global yang melanda di hampir semua negara termasuk Indonesia yang terkena dampaknya. Sesungguhnya secara teoritis menurut Jeff Haynes (1997) ada 3 (tiga) macam sebutan demokrasi yaitu : pertama; demokrasi formal dalam kehidupan demokrasi ini secara formal pemilu dijalankan dengan teratur, bebas dan adil. Tidak terjadi pemaksaan oleh negara terhadap masyarakatnya. Ada kebebasan yang cukup untuk menjamin dalam pemilihan umum. Namun demokrasi formal tersebut belum menghasilkan sebagaimana yang diinginkan masyarakat yaitu; kesejahteraan masyarakat yang didukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik. Model demokrasi seperti ini kemungkinan bisa dianalogikan dengan situasi dan kondisi di era reformasi saat ini yang tengah berlangsung. Kedua; demokrasi permukaan ; yaitu demokrasi seperti yang tampak dari luarnya memang demokrasi, tetapi sesungguhnya sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Demokrasi model ini kemungkinan lebih tepat jika dianalogikan dengan situasi dan kondisi demokrasi pada masa Orde Baru. Ketiga; demokrasi substantif, demokrasi model ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, mungkin saja di luar mekanisme formal. Sehingga kebebasan yang dimiliki masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan penting oleh negara atau pemerintah. Jadi demokrasi substantif tersebut memberikan keleluasaan

yang lebih dinamis tidak hanya demokrasi politik saja seperti selama ini dirasakan, tapi juga demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Model demokrasi substantif ini merupakan konsep yang menjamin terwujudnya perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jika demokrasi substantif bisa diwujudkan, barangkali dapat disebut sebagai demokrasi yang berkualitas. Karena implementasi demokrasi model ini mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yaitu nilai kebebasan yang memberikan akses di bidang ekonomi dan sosial, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat mampu bisa diwujudkan.

Adapun sudut pandang kegunaan dan keuntungan dengan menjalankan prinsip demokrasi menjamin kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas. Seperti yang disampaikan oleh Robert A. Dahl bahwa; pertama; dengan demokrasi, pemerintahan dapat mencegah timbulnya otokrat yang kejam dan licik; kedua; menjamin tegaknya hak asasi bagi setiap warga negara; ketiga; memberikan jaminan terhadap kebebasan pribadi yang lebih luas; keempat; dengan demokrasi dapat membantu rakyat untuk melindungi kebutuhan dasarnya, kelima; Demokrasi juga memberikan jaminan kebebasan terhadap setiap individu warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri; keenam; Demokrasi memberikan kesempatan menjalankan tanggung jawab moral; ketujuh; Demokrasi juga memberikan jaminan untuk membantu setiap individu warga negara untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki secara luas; kedelapan; Demokrasi juga menjunjung tinggi persamaan politik bagi setiap warga negara; kesembilan; Demokrasi juga



mampu mencegah perang antara negara yang satu dengan yang lain; kesepuluh; Demokrasi juga mampu memberikan jaminan kemakmuran bagi masyarakatnya.

Potret demokrasi seperti yang disebutkan diatas memerlukan perjuangan dan energi yang besar. Di samping itu perubahan paradigma yang juga diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi merupakan suatu keniscayaan, jika bangsa ini ingin terbebas dari belenggu ketergantungan dari pihak manapun. Perubahan paradigma dan perilaku tersebut harus selalu sinergi dengan prinsip etika dan moral politik, budaya politik serta keteladanan para elite politik. Dengan demikian model demokrasi yang berkualitas seperti disebutkan diatas, akan terwujud jika sistem dengan menggunakan sistim distrik, atau sistim proporsional dengan menggunakan sistim daftar calon berdasarkan penentuan suara terbanyak. Sebab dengan sistem tersebut pertama; masyarakat akan lebih cenderung memilih figure dan tidak memilih simbol partai politik, kedua; sistem ini menjamin terpilihnya wakil yang berkualitas, ketiga; hubungan wakil dan rakyatnya lebih dekat, keempat; wakil rakyat lebih independen dan berorientasi pada konstituennya.

#### **b. Pemilihan Umum Kepala daerah**

Kepala daerah adalah jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi dalam menggerakkan dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan disuatu daerah. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala

daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Oleh karena itu kepala daerah harus dipilih rakyat dan kepala daerah yang terpilih melalui sebuah pemilihan langsung, diharapkan mampu untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyatnya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah merubah system pemilihan kepala daerah dari system perwakilan oleh DPRD ke system Pemilihan langsung.

Pada awalnya peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik<sup>15</sup>. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pemilukada secara langsung menjadi alat bagi rakyat di daerah dalam berdemokrasi dan berpolitik, yang telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Pelaksananya menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik, seperti dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56

Presiden, yakni azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).<sup>16</sup>

Setiap kegiatan Pemilukada berkaitan dengan tahapan kegiatan lainnya yang terintegrasi dalam sistem Pemilukada langsung. ada 6 tahapan kegiatan administratif dalam proses Pemilukada langsung, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- (4) Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, KPPS.
- (5) Pembentukan dan pendaftaran pemantauan.
- (6) Penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Sedangkan dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung mempunyai 6 tahapan juga diantaranya sebagai berikut;

- (1) Pendaftaran pemilih
- (2) Pencalonan atau pendaftaran calon
- (3) Kampanye
- (4) Pemungutan suara

---

<sup>16</sup> Joko j Prihatmoko, **Pemilihan Kepala Daerah Langsung**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 110-111.

- (5) Penghitungan suara
- (6) Penetapan calon terpilih

Menurut Sapto Supono, setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa penyelenggaraan Pemilukada harus dilaksanakan secara langsung di daerah<sup>17</sup> :

- (1) Pemilihan kepala daerah langsung adalah bagian dari penyelenggaraa pemerintahan daerah.
- (2) Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hak otonomi daerah.
- (3) Dalam rangka memberikan tanggungjawab kepada daerah untuk menyelenggarakan proses demokrasi di tingkat lokal sebagaimana dalam pemilihan kepala desa.
- (4) Memberdayakan daerah dalam rangka memperkuat struktur sistem pemerintahan dengan bangunan piramida, dimana pemerintahan nasional ditopang dengan sistem pemerintahan daerah yang kuat.

Dalam suksesi kepala daerah, rakyat diharapkan dapat secara langsung menentukan pilihannya. Calon yang amanah, dan teruji peranannya akan berpeluang lebih besar dipilih rakyat, kecil kemungkinannya akan memilih calon pemimpin yang belum jelas komitmen dan prestasinya, apalagi yang bermasalah.

---

<sup>17</sup> Sapto Supono, *Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan Pilkada*, Puskodak Undip, Semarang, 2005, hal. 2.

Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia yang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya dalam penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan harapan.

Menurut Silahuddin dkk, permasalahan-permasalahan yang muncul selama penyelenggaraan Pemilukada langsung ialah :

a. Permasalahan kelembagaan Pemilukada

Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada, Pengawas (PANWAS). Serta dukungan pemerintah daerah selama Pemilukada berlangsung.

b. Permasalahan dalam tahapan persiapan Pemilukada

Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama Pemilukada antara lain adalah sempitnya masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD tentang masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah, masalah pemantauan Pemilukada dan masalah sosialisai.

c. Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada

Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pelanggaran kampanye, manajemen logistik, masalah money politik, masalah pendanaan dan pertanggungjawabannya, hak tersebut diatas merupakan masalah krusial pada tahapan pelaksanaan Pemilukada langsung.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Silahuddin, Edah Jubaedah, dan wawan Dharma S, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, 2007, hal. iii.

### 3. Strategi Pemenangan Pemilu

Strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” (Stratos: militer dan pemimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang, jadi istilah strategi pada awalnya muncul pada dunia militer.

Menurut Arnold Steinberg, strategi adalah rencana atau tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.<sup>19</sup>

Dalam dunia keorganisasian strategi yang dicapai yaitu garis-garis perjuangan yang menyangkut pedoman dalam mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan program, istilah strategi ialah sebagai garis besar kebijaksanaan yang menyangkut kristalisasi, konsolidasi, dan kaderisasi. Untuk jauh lebih relevan lagi kaitannya dengan penelitian ini penulis mencoba mengkaitkannya dengan strategi program jangka panjang, termasuk strategi organisasi partai yang menciptakan terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan mandiri.

Penilaian suatu strategi dapat dianalisis sesuai dengan strategi manajemen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor internal, yaitu proses mengidentifikasi dari berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi, yang mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Pito, TA, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Jakarta, 2005, hal. 621.

<sup>20</sup> Oleh Bryson (1999), dalam *Manajemen Modern Sektor Publik*, hal. 14.

- b. Faktor eksternal, yaitu proses mengidentifikasi berbagai faktor yang menyangkut peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi tersebut.

Untuk dapat menjelaskan lebih mendalam lagi mengenai strategi partai politik dalam memenangkan pemilu, dalam penelitian ini penulis mencoba mengelompokkannya kedalam tiga strategi. Yaitu yang pertama adalah rekrutmen, kedua koalisi, ketiga strategi kampanye.

#### **a. Rekrutmen**

Rekrutmen politik menjadi sangat penting keberadaannya dalam proses sebuah pemilihan, karena proses rekrutmen politik akan menentukan apakah partai politik akan mampu menghasilkan figur politik yang diharapkan dan diinginkan masyarakat luas. Dengan demikian rekrutmen politik memiliki arti yaitu suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk bisa mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan politik.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, proses rekrutmen politik dalam sistem politiknya tidak dirumuskan secara formal. Hal ini tentu berakibat pada kualitas proses pemilihan figur, karena proses rekrutmen yang berjalan menjadi tidak transparan dan tidak obyektif. Masyarakat pun tidak memiliki akses untuk bisa mengontrol proses jalannya seleksi, yang dilakukan partai untuk menghasilkan bakal calon yang nantinya akan diusung dalam sebuah pemilihan langsung tersebut.

Padahal ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik No.2 Tahun 2008 pasal 29 ayat (2) Bab XI tentang rekrutmen politik.

Berikut beberapa tahapan proses dalam rekrutmen yang dilakukan oleh partai dalam mencari figur kepala daerah yang akan diusungnya;

1) Penjaringan

Menyiapkan kader-kader politik yang disiapkan untuk menjadi calon (bakal calon) yang siap untuk diusung partai menjadi salah satu kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

2) Penyaringan

Melakukan seleksi terhadap calon-calon bupati yang sudah dipersiapkan partai. Seleksi ini berdasarkan hasil survey yang menggambarkan bakal calon mana yang memiliki peluang untuk dipilih masyarakat.

3) Penetapan

Penetapan salah satu bakal calon untuk menjadi calon bupati yang diusung partai dalam Pemilu yang akan berlangsung. Penetapan itu tentu berdasarkan pada kredibilitas, kualitas, dan besar tidaknya dukungan dari masyarakat terhadap calon tersebut.

4) Pembekalan calon Bupati dan Wakil Bupati

Untuk memaksimalkan kualitas dan potensi calon yang diusung, partai harus memberikan pembekalan politik. Tujuannya adalah untuk memantapkan ideologi politik dan kedewasaan politik calon yang diusungnya.



Adapun definisi rekrutmen menurut para ahli ialah sebagai berikut:

Menurut Czudnowski dalam Imawan(1992) rekrutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.

“ The process through which individuals or groups of individuals are inducted into active political roles”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah fungsi yang dijalankan oleh partai politik untuk menyeleksi figur-figur yang dapat dijadikan sebagai calon pejabat politik yang nantinya akan dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan melalui proses pemilihan langsung.

#### **b. Koalisi**

Sebelum menjelaskan secara detail mengenai koalisi penulis mencoba menjabarkan secara singkat mengenai partai politik. Disebutkan di dalam Undang Undang Tentang Partai Politik, Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara secara sukarela atas dasar persamaan dan kehendak cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu. Sedangkan Carl J. Friedrich berpendapat bahwa;

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi dan berdasarkan kekuasaan itu memberikan kegunaan materiil dan idiil bagi anggotanya dan masyarakat umum. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk memobilisasi dan mengaktifkan rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan

kompromi bagi pendapat yang bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepentingan politik secara absah dan damai.<sup>21</sup>

Menurut berbagai ahli dan penulis, terdapat berbagai penafsiran mengenai fungsi partai politik, demikian juga berlaku disetiap negara-negara dimana fungsi politik itu berbeda-beda berdasarkan dari apa keinginan yang ingin dicapai oleh masing-masing negara tersebut. Secara umum partai politik memiliki fungsi yaitu:

- (1) Artikulasi kepentingan
- (2) Agregasi kepentingan
- (3) Sosialisasi politik
- (4) Komunikasi politik
- (5) Pengaturan konflik
- (6) Rekrutmen politik

Koalisi sendiri merupakan penggabungan kekuatan dua atau lebih partai politik untuk menggalang kekuatan lebih besar di ranah eksekutif maupun legislatif. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh dalam pembuatan undang – undang dan perebutan kekuasaan. Koalisi digunakan oleh partai pemenang Pemilu untuk menggalang dukungan dalam membentuk pemerintahan. Sedangkan pada kasus lain koalisi digunakan oleh partai oposan untuk membangun basis kekuatan mereka.

Dan koalisi ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kepartaian yang ada di negeri ini yaitu sistem multi partai. Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan partner dalam berkoalisi.

---

<sup>21</sup> Khoirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 17.

Hanya partai tertentu saja yang dapat menciptakan koalisi yang kondusif dan dapat berjalan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan dari koalisi tersebut. Yang dimaksud dari partai yang dapat mengkondusifkan koalisi adalah partai-partai yang memiliki tujuan dan ideologi yang sama, sehingga tidak ada perbedaan yang ekstrim dalam mengambil sebuah keputusan di tubuh koalisi tersebut.

Di bawah ini beberapa jenis koalisi menurut Arend Lijphart :

a. Minimal Winning coalition

Memaksimalkan kekuasaan atau sebanyak mungkin peroleh kursi di kabinet dan abaikan partai yang tidak perlu. Koalisi dibentuk tanpa perlu mempedulikan posisi partai dan spectrum ideologi

b. Minimal Size Coalition

Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.

c. Bargining proposition

Jenis koalisi ini mempunyai jumlah partai paling sedikit. Jenis ini mempunyai prinsip dasar, memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar, karena anggota koalisi hanya sedikit.

d. Minimal Range

Koalisi ini mempunyai prinsip dasar, kedekatan pada kecenderungan ideologis memudahkan partai-partai berkoalisi membentuk kabinet.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Cipto, *Partai, kekuasaan dan militerisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 22.

Berikut beberapa cara umum yang dilakukan oleh partai politik dalam memantapkan koalisi:

- (1) Komunikasi intensif terhadap partai-partai yang memiliki peluang untuk menjadi partai koalisinya dalam Pemilu yaitu Membuat kesepahaman antar calon partai koalisi baik tujuan maupun cita-cita, agar koalisi berjalan solid hingga akhir.
- (2) Penetapan partai-partai koalisi  
Membuat kontrak politik agar koalisi berjalan berdasarkan rule.
- (3) Konsolidasi internal partai untuk memperkuat internal PDIP melalui koordinasi kelembagaan, Optimalisasi kader partai, peningkatan sistem organisasi.
- (4) Konsolidasi antar partai koalisi

### **c. Strategi Kampanye**

Kampanye berusaha untuk mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan, untuk memberikan suara kepada sang calon. Untuk meraih sebanyak mungkin pemilih, kandidat perlu melakukan *smart campaign*.

Namun kini paradigma kampanye telah mengalami pergeseran. Paradigma lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan untuk meyakinkan pemilih telah pudar dan diganti dengan paradigma baru yang menyebutkan bahwa kampanye merupakan komunikasi politik dan pendidikan.

Kampanye adalah bagian yang inheren dari kegiatan Pemilu dan Pemilukada. Karena itu kampanye harus direncanakan, dibuat strategi dan teknik baik yang menyangkut materi kampanye maupun model kampanye. Dalam kamus politik, strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan terutama dalam hal perang dan damai.<sup>23</sup>

Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “ serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” merujuk pada definisi itu maka setiap aktifitas kampanye harus mengandung empat hal yakni : (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) jumlah khalayak sasaran yang besar, (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Kampanye pada dasarnya adalah proses untuk menyampaikan pesan-pesan dari komunikan kepada khalayak. Pesan-pesan itu sendiri dapat disampaikan melalui beberapa cara dan media, seperti poster, baliho, koran, pidato, iklan hingga selebaran.

Berdasarkan jenisnya, kampanye dapat dibagi menjadi dua yaitu kampanye politik dan kampanye Pemilu. Perbedaan antara kampanye politik dan Pemilu dapat dilihat dari 9 dimensi, berikut perbedaan dari sudut ke sembilan dimensi tersebut:

---

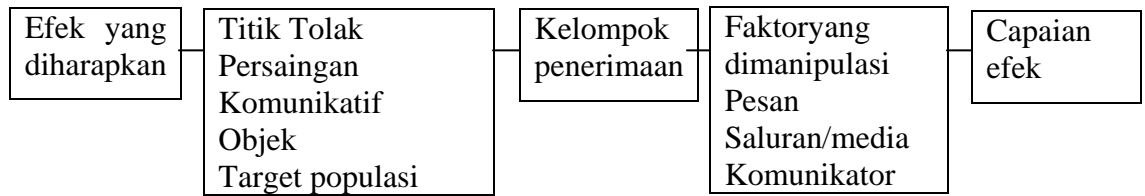
<sup>23</sup> BN. Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 349.

**Tabel 1.4**  
**Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik**

	<b>Kampanye Pemilu</b>	<b>Kampanye Politik</b>
Jangka dan batas waktu	Periodik dan tertentu	Jangka panjang dan terus menerus
Tujuan	Menggiring pemilih ke bilik suara	Image politik
Strategi	Mobilisasi dan berburu pendukung <i>Push marketing</i>	Membangun dan membentuk reputasi politik <i>Pull Marketing</i>
Komunikasi Politik	Satu arah dan penekanan kepada janji dan harapan politik kalau menang Pemilu	Interaksi dan mencari permasalahan beserta solusi yang dihadapi masyarakat
Sifat hubungan antara kandidat dan pemilih	Pragmatis/transaksi	Hubungan relasional
Produk politik	Janji dan harapan politik Figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi Idiologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai
Sifat program kerja	<i>Market-oriented</i> dan berubah-ubah dari Pemilu satu ke Pemilu satunya.	Konsisten dengan sistem nilai partai
Retensi memori kolektif	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
Sifat kampanye	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya	Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik simpati masyarakat

*Sumber: Firmanzah Ph.D, Marketing Politik, 2008, hal. 277.*

Sedangkan Nowak dan Warneryd memberikan satu model kampanye yang kita kenal dengan model Nowak dan warneryd, berikut model kampanyenya yang ada di dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1****Model Kampanye**

*Sumber : Antar Venus, Manajemen kampanye, 2004*

Strategi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah merupakan perencanaan yang cermat yang disusun dan dilaksanakan oleh tim kampanye yang memiliki tujuan mencapai kemenangan atas sasaran yang ditentukan dalam Pemilu. Sasaran merupakan apa yang ingin dicapai oleh kandidat dan tim kampanye dalam hal ini adalah target dukungan pemilihan yang diwujudkan dalam pemberian suara kepada kandidat tersebut. Ruang lingkup pembahasan strategi tak sebatas pada tatanan konsep atau rencana, namun yang terpenting adalah bagaimana kandidat dan tim kampanye tersebut mengimplementasikannya di lapangan.

Berikut contoh kegiatan kampanye yang dilakukan beberapa partai di Indonesia.

- (1) Pembentukan tim pemenangan pasangan yang diusung partai
- (2) Penjadwalan dan penentuan kegiatan yang jelas dalam masa kampanye
- (3) *Door to door*, memperkenalkan calon bupati yang diusung secara langsung kepada masyarakat. Dengan menurunkan beberapa kader

untuk bisa berkomunikasi dan memperkenalkan kepada masyarakat secara langsung.

(4) Pendekatan tokoh

Silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun hubungan, baik tokoh agama maupun masyarakat

(5) Melakukan bakti sosial dan bantuan kemanusiaan

(6) Melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi, sebagai contoh apabila ada acara hari besar partai atau kandidat mengadakan kegiatan di dalam masyarakat

(7) Penyebaran pamflet, baliho, dan spanduk pasangan yang diusung di tempat-tempat strategis

Dalam sebuah pemilihan kepala daerah, penulis mengasumsikan bahwa kepribadian dan citra politik kandidat adalah faktor penting yang dapat menentukan kemenangan dalam sebuah pemilihan. Melalui kampanye, citra politik seseorang atau kelompok dibentuk dan diperkenalkan. Dalam menentukan sebuah pilihan, tentu pemilih memiliki sejumlah pertimbangan, yaitu citra sosial, identitas partai, *emotional feeling*, *candidate personality*, isu dan kebijakan politik, peristiwa mutakhir dan peristiwa personal.



**Tabel 1.5**  
**Atribut Citra Seseorang Kandidat Politik**  
 (dari Schweiger & Adami, 1999)

<b>Dimensi</b>	<b>Atribut positif</b>	<b>Atribut negatif</b>
Kejujuran	Jujur Kredibel Bisa dipegang ucapannya Transparan Andal Reputasi Jujur	Terlibat skandal Penggelapan Melanggar kontrak
Kualitas	Pengetahuan Latar belakang pendidikan Kapabel Perencana Berpengalaman	Tak berpengetahuan mengelola pemerintahan Tak punya pengetahuan bisnis Tak berpengalaman internasional Tidak <i>qualified</i>
Akar nasional	Representasi negara kita Tahu kebutuhan bangsa Tradisional Berminat dengan kultur kita Cinta tanah air	Orang asing Tak tahu sejarah bangsa
Kekuatan	Kuat Pemenang Energik Keras Penuh kesuksesan	Lemah Pecundang Tanpa tulang punggung
Kegairahan	Mencintai pekerjaannya Peduli pada bangsa Suka membantu Ide-ide modern Gemar olah raga Berorientasi keluarga Mudah tahu masalah kita	Keras kepala Tanpa perasaan

*Sumber: Adman Nursal, Political Marketing, 2004.*

Image politik sendiri bisa didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik. Image politik atau yang sering disebut dengan citra politik inilah yang dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap figur kandidat. Sedangkan definisi image politik menurut Dutton adalah cara anggota organisasi dalam melihat kesan dan citra yang ada dibenak orang.<sup>24</sup>

Ada lima pendekatan untuk mengukur citra menurut Schweiger dan Adami yaitu:<sup>25</sup>

- (1) Penyimpulan responden tentang perasaan, keyakinan, dan perilakunya terhadap obyek, yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, menciptakan skala rating yang digunakan responden untuk menilai berbagai atribut obyek dan yang kedua, penyimpulan yang dilengkapi dengan penilaian berdasarkan skala sikap.
- (2) Penyimpulan yang diperoleh dari pengamatan perilaku lahiriah obyek.
- (3) Penyimpulan dari respon terhadap stimulus-stimulus parsial yang terstruktur mengenai obyek yang dinilai.
- (4) Kinerja tugas-tugas obyektif dari obyek yang dinilai
- (5) Reaksi-reaksi logis para responden terhadap sikap-sikap obyek yang dinilai.

---

<sup>24</sup> Firmanzah Ph.D, *Op.Cit*, hal. 229-230.

<sup>25</sup> Adman Nursal, *Political Marketing*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2004, hal. 284-285.

### **E. Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Digunakan konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.<sup>26</sup>

1. Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
2. Pemilihan kepala daerah adalah proses demokrasi di daerah yang bertujuan untuk memilih kepala daerah secara langsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
3. Strategi adalah langkah taktis yang dilakukan oleh kandidat maupun partai dengan mengoptimalkan kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk ikut dalam persaingan merebut suara terbanyak, dan berusaha mendapatkan kemenangan pada pemilihan umum atau Pemilu.
4. Partai politik adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang telah terorganisir di dalamnya dan mempunyai orientasi nilai-nilai, cita-cita dan tujuan yang sama untuk bertindak sebagai satu kesatuan politik.

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1992, hal. 34.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur sebagai bagian penelitian yang memberikan pengertian bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.<sup>27</sup>

Dengan demikian agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka dapat dioperasionalkan terlebih dahulu. Untuk itu penulis mempergunakan variabel-variabel dalam penelitiannya, yaitu;

Strategi PDI-Perjuangan dalam Pemilukada:

1. Rekrutmen
  - a. Penjaringan
  - b. Penyaringan
  - c. Penetapan
  - d. Pembekalan calon Bupati dan Wakil Bupati
2. Koalisi
  - a. Komunikasi intensif terhadap partai-partai yang memiliki peluang untuk menjadi partai koalisinya dalam Pemilukada
  - b. Penetapan partai-partai koalisi
  - c. Konsolidasi internal partai
  - d. Konsolidasi antar partai koalisi
3. Strategi Kampanye
  - a. Pembentukan tim pemenangan pasangan yang diusung partai

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 46.

- b. Penjadwalan dan penentuan kegiatan yang jelas dalam masa kampanye
- c. *Door to door*
- d. Pendekatan tokoh
- e. Melakukan bakti sosial dan bantuan kemanusiaan
- f. Melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi, sebagai contoh apabila ada acara hari besar partai atau kandidat mengadakan kegiatan di dalam masyarakat
- g. Penyebaran pamflet, baliho, dan spanduk pasangan yang diusung di tempat-tempat strategis

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mans adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisi dan menyajikan datat-data dan fakta-fakta secara sistemis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hal. 63.

Dengan demikian jenis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang membuat deskripsi atau gambaran secara sistemis dan aktual mengenai serangkaian peristiwa faktual yang terjadi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapat informasi menyangkut masalah penelitian skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kantor DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kulon Progo. Pada tanggal 25 Oktober 2011.

## **3. Unit analisis**

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai strategi PDI-Perjuangan dalam memenangkan pasangan dr.H.Hasto Wardoyo, Sp.OG dan Drs.H.Sutedjo dalam Pemilukada Kulon Progo 2011, sebagai bagian dari pelengkap dalam penyusunan skripsi, maka peneliti memfokuskan unit analisisnya ke dalam:

- a. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Kulon Progo
- b. KPUD Kabupaten Kulon Progo
- c. Ketua tim sukses pemenangan pasangan dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG dan Drs.H.Sutedjo dalam Pemilukada Kulon Progo 2011

## **4. Jenis Data**

Dalam mengumpulkan data dan informasi, sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, keterangan ini diperoleh dari nara sumber yang diwawancarai penulis: Pertama; Ketua DPC PDI-Perjuangan Toni Hari Prasetyo yang menjabat juga sebagai ketua Bapilu Kedua, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Istono,SH ketiga, H Umar Sriyanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bapilu keempat, Bendahara PDI-Perjuangan yang juga menjabat sebagai bendahara Sekber Achid Nuryati dan kelima, Bambang Sumbogo, BA struktural partai yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, pemuda dan olahraga dan tim Sukses pemenangan Pasangan dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG dan Drs.H.Sutedjo dalam Pemilu pada Kulon Progo 2011.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lokasi atau objek penelitian, seperti data yang bersumber pada buku-buku, koran, dokumen lembaga, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan data yang diperoleh untuk membantu peneliti menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, tahap pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data. Data merupakan bukti konkrit, keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Ada beberapa metode

yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain, metode dokumentasi, dan penelitian lapangan, seperti wawancara dan observasi.<sup>29</sup>

### **1. Dokumentasi**

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Maka semua itu diperoleh dari dokumen, catatan, arsip, maupun risalah yang dimiliki unit-unit analisa dalam penelitian ini. Penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang sangat relevan sangat dibutuhkan.

Dokumentasi sebuah penelitian sangat diperlukan untuk memperkuat dan menjadi bukti nyata penelitian. Dokumentasi dapat berupa;

#### **a. Notulensi**

Mencatat semua data yang dapat memperkuat hasil penelitian. Data yang di maksud adalah data hasil wawancara.

#### **b. Pemberitaan di media massa**

Pemberitaan di media massa yang dimaksud adalah segala tulisan atau informasi mengenai strategi pemenangan PDI-Perjuangan dalam Pemilu pada yang dimuat atau diberitakan di media massa, seperti di koran, artikel, iklan-iklan, dll.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu instrumen dalam penelitian. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui berbagai informasi. Wawancara

---

<sup>29</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rewana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 130.



dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang mendalam dengan menggunakan *interview guide* atau secara bebas dan spontan. Maka dalam wawancara mendalam tersebut, terlebih dahulu penulis memerlukan sebuah pedoman wawancara yang harus sesuai atau sejalan dengan tujuan dalam penelitian skripsi ini.<sup>30</sup>

Teknik ini digunakan peneliti untuk mengetahui secara langsung berbagai bentuk persepsi, pendapat, dan penilaian khusus dari beberapa nara sumber yang dianggap penulis mempunyai kompetensi sebagai sumber informasi mengenai penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada lima orang yang kelima-limanya merupakan bagian dari struktural partai PDI-Perjuangan. Berikut daftar nara sumber yang diwawancarai penulis: Pertama; Ketua DPC PDI-Perjuangan Toni Hari Prasetyo yang menjabat juga sebagai ketua Bapilu Kedua, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Istono,SH ketiga H Umar Sriyanto yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bapilu keempat, Bendahara PDI-Perjuangan yang juga menjabat sebagai bendahara Sekber Achid Nuryati dan kelima, Bambang Sumbogo, BA struktural partai yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, pemuda dan olahraga. Dan Tim sukses pemenangan pasangan dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG dan Drs.H.Sutedjo dalam Pemilukada Kulon Progo 2011. Tujuannya ialah mendapatkan informasi yang lebih jelas dari narasumber yang mempunyai peran kunci dalam permasalahan di penelitian skripsi ini.

---

<sup>30</sup> Ida Bagoes Mantra, Ph.D, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 82-84.

## I. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh cukup memadai untuk mendukung proses analisis, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam analisis data ini data yang telah dikumpulkan akan diolah dan kemudian di analisis selanjutnya untuk dapat dirumuskan.

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Sedangkan analisa data menurut Bogdan dan Taylor sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.<sup>31</sup>

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini ialah penelitian bersifat deskripsi yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Adapun Langkah-langkah dalam analisa data kualitatif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data yang diperoleh di kelompokkan untuk memudahkan proses penelitian.

---

<sup>31</sup> Dr.Lexy J. Moleong, MA, *Op.Cit.*, hal. 103.

## 2. Penyajian data

Data-data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan. Penyajian disini dimaksudkan sebagai kumpulan informasi tersusun yang kemungkinan akan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal itu bermaksud akan sangat mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang diperoleh.

## 3. Menarik kesimpulan

Dengan memperoleh data-data yang akurat yang telah melalui proses reduksi dan penyajian tadi, maka nantinya penulis akan memperoleh kemudahan dalam menarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.